

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Jalan Terus

Balai Besar diminta menggunakan material yang bersifat alami.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta terus membebaskan lahan yang diperlukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane untuk normalisasi sungai. Namun pemerintah DKI meminta agar Balai Besar melakukan normalisasi dengan material yang bersifat alami seperti pada program naturalisasi.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusmada Faizal, mengatakan pada tahun lalu anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi yang terserap sebesar Rp 488 miliar. "Pada tahun ini juga diteruskan pembebasan lahan," katanya.

Pemerintah DKI tahun lalu membebaskan lahan di wilayah Jakarta Selatan, seperti Tanjung Barat, Pejaten Timur, dan Bukit Duri. Sedangkan lahan di wilayah Jakarta Timur

yang dibebaskan terletak di Gedong, Balekambang, Cawang, Kampung Melayu, dan Bidara Cina. Semuanya berada di bantaran Ciliwung.

Lahan yang telah dibebaskan di wilayah yang dialiri Ciliwung itu, kata Yusmada, lebih dari 200 bidang tanah dengan luas mencapai 13 hektare. "Saya sudah laporkan ke Kepala BBWSCC (Balai Besar) terkait pengadaan tanah untuk normalisasi Ciliwung itu," tuturnya.

Menurut Yusmada, pemerintah DKI telah menyurati Balai Besar pada 27 Agustus lalu perihal kelanjutan proyek normalisasi sungai. "Kami menyarankan agar pembangunan fisik menggunakan material alami dan ramah lingkungan," tuturnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, kemarin.

Normalisasi sungai di Jakarta, salah satunya Ciliwung, mandek sejak 2017. Mandeknya proyek anti-sipasi banjir itu karena

"Pada tahun ini juga diteruskan pembebasan lahan."

—Yusmada Faizal

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Jalan Terus

pemerintah DKI lamban dalam proses pembebasan lahan.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih melakukan naturalisasi sungai. Hal itu ia kemukakan sejak masa kampanye pemilihan gubernur yang lalu. Anies menginginkan sungai-sungai di Jakarta ditata secara alami.

Ketimbang dibeton permanen, Anies mengusulkan agar tepian sungai dibuat berundak-undak dengan dinding penahan dari tanah atau batu kali. Agar kokoh, tanggul alami itu nanti ditanami pohon pengikat tanah.

Pejabat Pembuat Komitmen Naturalisasi Dinas Sumber Daya Air DKI

Jakarta, Yose Rizal, menuturkan naturalisasi dan normalisasi sungai itu saling melengkapi. Balai Besar bisa melakukan normalisasi sungai dengan memasang *sheet pile* atau beton di tepi sungai. "*Sheet pile* kan untuk mencegah dinding tanah longsor," tuturnya.

Yose menjelaskan, naturalisasi kali dan waduk yang akan dilakukan pemerintah DKI akan menciptakan ruang terbuka hijau. "Jadi, masyarakat juga bisa menikmati sungai itu," katanya.

Gubernur Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara

Terpadu dengan Konsep Naturalisasi, pada 25 Maret lalu. Peraturan itu menyebutkan naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayah, menjelaskan program normalisasi sungai yang dilakukan Balai Besar merupakan bagian dari naturalisasi. Namun ada beberapa lokasi sungai yang harus dilebarkan, karena lebar sungainya hanya sepuluh sampai 15 meter.

● JULNIS FIRMANSYAH

Polemik Naturalisasi Sungai Jakarta

KETUA Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 terlambat. Peraturan tentang pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi itu seharusnya diterbitkan sejak awal. Sebab, naturalisasi sungai dan waduk menjadi program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir Jakarta.

"Kalau bicara program unggulan, ya, masak sekian tahun jadi gubernur baru dikeluarkan," kata Gembong melalui sambu-

ngan telepon, kemarin.

Menurut Gembong, selama sekitar 1,5 tahun menjabat, Anies tidak sungguh-sungguh menuntaskan persoalan banjir di Ibu Kota. Pemerintah DKI, ujar dia, belum merealisasi program pengendalian banjir.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono juga mempertanyakan konsep naturalisasi sungai yang digagas pemerintah DKI. "Beliau punya ide naturalisasi, lah *opo iki?* Saya ajak *ngoceh aja*, diskusi. Apa programnya, mari kami bareng-bareng. Nah, ini belum ketemu," tuturnya, 19 Maret lalu.

Pengamat tata kota dari

Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menuturkan baik normalisasi maupun naturalisasi sungai, pemerintah Jakarta tetap perlu menertibkan bangunan yang ada di sempadan sungai. "Relokasi permukiman warga di bantaran sungai adalah keharusan," katanya.

Sebelumnya, Anies mengatakan di antara dirinya dan Menteri Basoeki sudah sering mengobrol untuk membahas konsep naturalisasi sungai di Jakarta. Namun, menurut dia, isu yang sering timbul seakan-akan dia dan Basoeki memiliki perbedaan pandangan ihwal program itu. ● JULNIS FIRMANSYAH

| LANI DIANA | GANGSAR PARIKESIT